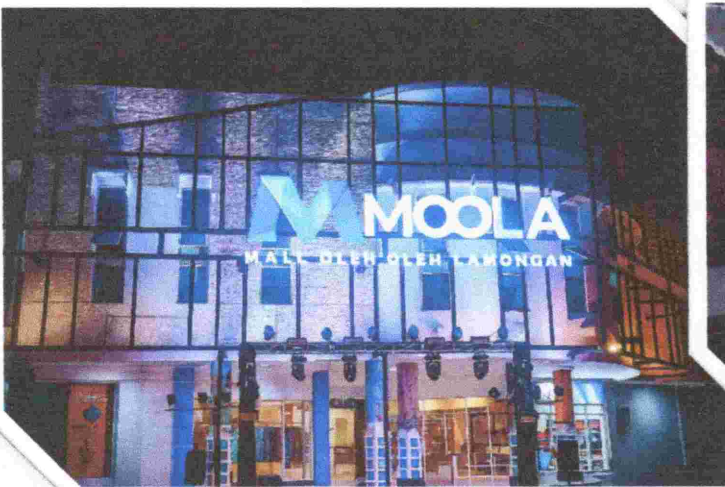




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud Dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd.....	34
2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	15
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi.....	37
3.2 Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025	37
3.3 Program dan Kegiatan PD Tahun 2025	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	51
BAB V PENUTUP	
5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	52
5.2 Rencana Tindak Lanjut.....	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan telah selesai disusun.

Rancangan Akhir Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2025 ini merupakan turunan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2024. Sebagai turunan RKPD, Renja ini secara khusus menerjemahkan dan menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaktub pada RKPD ke dalam perencanaan pembangunan tahunan dibidang industri dan perdagangan .

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis terkait bidang perindustrian dan perdagangan baik ditingkat nasional, Propinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Lamongan. Selain itu Renja ini sedapat mungkin mengupayakan sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan nasional yang diambil Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan melalui Kabupaten Lamongan . Masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam Musrenbang maupun Forum Gabungan yang difasilitasi Oleh Bappeda Kabupaten Lamongan tahun 2025 juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja ini.

Kami menyadari bahwa materi yang disajikan dalam Rancangan Akhir Renja ini masih banyak kekurangan dan kelemahan , oleh karena itu kami berharap masukan dan saran guna penyempurnaan penyusunan Renja ini. Semoga Rancangan Akhir Renja ini dapat mewujudkan Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan.

Lamongan, 4 Juni 2025

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lamongan



ANANG TAUFIK, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750404 199602 1 003

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan Tupoksinya.

Sebagai Dokumen resmi Perangkat Daerah, Rencana Kerja. Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis , yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan sebagaimana yang termuat dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah yang menjafi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah .

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan membuat RKPD yang merupakan rencana kegiatan tahunan dan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahunan tersebut. Dengan adanya Renja ini, diharapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator dan katalisator dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Darah
- e. Perumusan rancangan akhir, dan ;

f. Penetapan.

Selanjutnya Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan yang telah disusun ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2025 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Lamongan bidang perencanaan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD , serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lemaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1: ;
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan berdasarkan Ranwal RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2025 sebagai motor penggerak perekonomian akan terus didorong peran dan kontribusinya terhadap pembangunan melalui peningkatan dan pengembangan perdagangan dan industri terutama IKM/IRT dalam penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja yang luas.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

1. Pelaksanaan Perangkat Daerah;
2. Pelaksanaan dan Evaluasi program dan kegiatan ;

3. Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

B A B I PENDAHULUAN

Bab ini memuat:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rentra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat :

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah , dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target , telah memenuhi target maupun melebihi target kinerja yang telah direncanakan , sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
3. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 –2026.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 dan pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program Dan Keluaran s/d Tahun Berjalan (n-1n 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)*	11 = (10/4)*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan	81%	94,86%	80%	73,45%	91,81%	80,5%	80,5%	99,38%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,penganggaran dan Evaluasi kinerja yang disusun secara tepat waktu	17 dokumen	97,44%	17 dokumen	17 dokumen	100%	17 dokumen	17 dokumen	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen (Renja Thun N+1 Renja Perubahan, Dokumen RKA Perubahan, RKA Tahun N+1)	98,29%	5 Dokumen (Renja Thun N+1 Renja Perubahan, Dokumen RKA Perubahan, RKA Tahun N+1)	5 Dokumen (Renja Thun N+1 Renja Perubahan, Dokumen RKA Perubahan, RKA Tahun N+1)	100%	5 Dokumen (Renja Thun N+1 Renja Perubahan, Dokumen RKA Perubahan, RKA Tahun N+1)	5 Dokumen (Renja Thun N+1 Renja Perubahan, Dokumen RKA Perubahan, RKA Tahun N+1)	100%
	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD		-	-	-	-	-	-	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen (LKPJ, LKJIP, LPPD, SAKIP, Evaluasi Renja. Dokumen RKPD)	96,60%	6 Dokumen (LKPJ, LKJIP, LPPD, SAKIP, Evaluasi Renja. Dokumen RKPD)	6 Dokumen (LKPJ, LKJIP, LPPD, SAKIP, Evaluasi Renja. Dokumen RKPD)	100%	6 Dokumen (LKPJ, LKJIP, LPPD, SAKIP, Evaluasi Renja dan SKM)	6 Dokumen (LKPJ, LKJIP, LPPD, SAKIP, Evaluasi Renja dan SKM)	100%

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	26 dokumen	94,89%	26 dokumen	100%	26 dokumen	100%	26 dokumen	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 erang	94,84%	30 erang	100%	30 orang	100%	30 orang	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	100%	1 Dekumen	100%	1 Dokumen	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian dengan baik	100%	99,96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	50 paket	99,90%	50 paket	100%	50 paket	100%	50 paket	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang	100%	2 orang	100%	2 orang	100%	50 Orang	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimtek	-	-	-	-	-	-	2 orang	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan persediaan barang dan jasa yang tepat waktu	12 laporan	94,07%	12 laporan	100%	12 laporan	100%	12 laporan	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan		99,99	12 paket	100%	12 paket	100%	12 paket	-
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor		99,38%	10 paket	100%	10 paket	100%	10 paket	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Item Peralatan Rumah Tangga		99,99					Gorden	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		100%	35 paket	100%	35 paket	100%	35 paket	-

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		98,50%	4 paket	4 paket	100%	4 paket	4 paket	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan		51,27%	10 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	10 dokumen	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		94,35%	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Gedung Kantor /Bangunan Lainnya	jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	-
	pengadaan mebel			-				100%	100%	-
	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		-	1 unit	1 unit	100%	100%	100%	-
	pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya			-	1 unit	1 unit	100%	100%	100%	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik	100%	92,71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		98,02%	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		100%	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		90,33%	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik dalam kondisi baik	100%	99,15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	97,67%	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	99,56%	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan banunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	99,80%	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	98,12%	14,05%	14,05%	100%	100%	100%	100%
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Perdagangan yang dibangun	98,09%	14,05%	14,05%	100%	13 Unit Pasar dan 2 unit PKL	13 Unit Pasar dan 2 unit PKL	-
	% Peningkatan jumlah pedagang	-	1 sentra PKL	1 sentra PKL	100%	24,1%	24,1%	69,65%
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana distribusi perdagangan	98,04%	17 unit	17 unit	100%	13 Unit Pasar dan 2 unit PKL	13 Unit Pasar dan 2 unit PKL	-
	Jumlah sentra PKL yang dibangun, direvitalisasi dan direhabilitasi	-				-	-	-
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	99,08%	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	-
	Jumlah Operasional Resi Gudang	-	12 bulan	12 bulan	100%			-
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	% Peningkatan pedagang yang dibina	98,32%	24,31%	24,31%	100%	35%	35%	70%
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola saran distribusi perdagangan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	-

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	0,2%	93,07%	0,01%	0,01%	100%	0,1%	0,1%	50%
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	% perubahan harga barang	0,2%	93,08%	0,01%	0,01%	100%	0,01%	0,01%	50%
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		91,08%	1 laporan	1 laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	-
	Jumlah evaluasi Pengadaan Perangkat Lunak			1 Perangkat Lunak	1 Perangkat Lunak	100%	-	-	-
	Jumlah Dokumen Analisa Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
	jumlah peserta evaluasi monitoring harga kebutuhan bahan pokok dan bahan penting lainnya			27 peserta	27 peserta	100%	-	-	-
	Jumlah Dokumen Data Produsen dan Distributor Barang Kebutuhan Pokok			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 kabupaten/kota		98,70%	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	-
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase kinerja realisasi pupuk	55,20%	92,86%	37,90%		100%	44,90%	44,90%	81,34%
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perijinan	Jumlah peserta sosialisasi Legalitas penyalur Pupuk Bersubsidi		87,50%	60 orang		100%	1 Dokumen	1 Dokumen	-

Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pelaksanaan Pengawasan	100%	10 Kali	100%	100%	100%	100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	-
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Net Ekspor (rupiah)	2.420.714	2.152.004.000.000 rupiah	99,11%	99,11%	4.302%	92.580.360.625.463,70 rupiah	4.302%	2.238.085	2.238.085	92,33%
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah IKM/UKM yang terfasilitasi Promosi Dagang	18%	10 %	99,11%	99,11%	100%	10 %	100%	30 IKM/IKM	30 IKM/IKM	-
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	jumlah pelaku usaha produk ekspor unggulan yang di bina		100 pelaku usaha	99,18%	99,18%	100%	100 pelaku usaha	100%			-
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang		50 pelaku usaha	98,70%	98,70%	100%	50 pelaku usaha	100%	50 Pelaku usaha	50 Pelaku usaha	-
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	jumlah pelaku usaha yang di fasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan		30 pelaku usaha	98,89%	98,89%	100%	30 pelaku usaha	100%	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	-
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Pengelolaan Showroom		-	-	-	-	-	-	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	-
	jumlah item media informasi promosi		-	-	-	-	-	-			-
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Peserta Pembinaan		-	-	-	-	-	-			-
	Jumlah peserta peningkatan kapasitas dan jaringan kerjasama bagi IKM		-	-	-	-	-	-			-
	Pendataan Pelaku Usaha Ekspor		-	-	-	-	-	-			-
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	89,96%	58,62 %	95,50%	95,50%	100%	58,62 %	100%	78.00%	78.00%	86,70%
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat alat Ukur Takat Timbang dan Pertengkapannya (UTTP) yang ditera / tera ulang dalam tahun berjalan	10,279%	58,62 %	95,50%	95,50%	100%	58,62 %	100%	78.00%	78.00%	-

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat pengungkapan ditera ulang		94,89%	5 kali	5 kali	100%	7995 alat UTPP	7995 alat UTPP	-
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Penambahan Ruang lingkup	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dilina	100%	100%	50 orang	50 orang	100%	10 kali (6orang)	10 kali (6orang)	-
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan omset produk lokal	8%	86,61%	6%	6%	100%	7%	7%	87,5%
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah IKM yang mendapat fasilitas pemasaran	200 IKM	86,61%	100 IKM	100 IKM	100%	150 UMKM	150 UMKM	-
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota		97,69%	100 UMKM	100 UMKM	100%	100 UMKM	100 UMKM	-
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		97,90%	100 UMKM	100 UMKM	100%	100 UMKM	100 UMKM	-
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	jumlah data informasi sistem dan jaringan informasi perdagangan	85,11%		2 Dokumen	2 Dokumen	100%			-
pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri	jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemetaan sandang produksi dalam negeri	-	-	100 orang	100 orang	100%	100 Orang	100 Orang	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	2,20%	96,27%	1,10%	1,10%	100%	2,12%	2,12%	96,36%

	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang dibina	100%	96,27%	100%	100%	300 IKM	300 IKM	-
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jml. Dokumen rancangan pembangunan industri kabupaten/ kota	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri	96,26%	3 dokumen	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	-
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	97,41%	1 dokumen	1 dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	-
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	96,12%	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	-
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah monitoring dan evaluasi pembangunan industri	-	-	-	-	-	-	-
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase pertumbuhan IKM formal	82%	91,49%	70,80%	100%	78%	78%	95,12%
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUII), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota/kota berbasis sistem informasi industri nasional (SINAS)	Persentase jumlah izin yang di terbitkan Usaha industri (IUI) kecil dan menengah yang di terbitkan	100%	91,49%	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase jumlah jnin perluasan industri (IPU) bagi industri kecil dan menengah yang di terbtkan					-		-
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IU, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik berbasis sistem informasi industri nasional (SINAS)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perijinan berusaha sektor industri dan atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan risiko usaha menengah tinggi dan tinggi melalui SINAS yang terintegrasi dengan sistem OSS		95,26%	100 dokumen	100 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perijinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IU, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis Informasi Industri nasional (SINAS)	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Pengawasan		85,49%	25 kali	25 kali	100%	-	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data IKM yang masuk dalam SINAS	1,60%	99,09%	0,20%	0,20%	100%	1,2%	1,2%	75%
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IU, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IU, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	1 dokumen	99,09%	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	-
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan pengelolaan dan analisis data industri data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional SINAS		99,09%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	-

		jumlah pembaharuan software		-	1 software	1 software	100%	-	-	-
	Diseminasi , Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota	Jumlah peserta		-				-	-	-
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten /Kota Dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		-	-	-	-	-	-	-

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021 – 2026, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lamongan

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Skala Usaha Menengah Terhadap IKM			4,00%	4.5%	5,00%	6,00%	4%	4,15%	5,00%	6,00%	Terpenuhi
2	Persentase Peningkatan Volume Perdagangan			30%	40%	50%	60%	53%	40,19%	50%	60%	Terpenuhi

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Terdapat beberapa isu-isu yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing industri melalui standarisasi produk
2. Peningkatan Nilai tambah produk yang dihasilkan oleh IKM
3. Pembangunan stabilitas harga yang perlu dijaga melalui pemantauan harga terutama harga kebutuhan pokok

Stabilitas harga merupakan isu perdagangan yang sangat penting dan sensitive bagi masyarakat . Dinas Perindustrian dan Perdagangan dituntut menyediakan informasi harga, terutama harga kebutuhan pokok secara cepat dan akurat,Sistem informasi ketersediaan dan harga bahan Kebutuhan Pokok (Sipuldabapok) yang telah ada harus terus dioptimalkan .

4. Peningkatan perdagangan dalam negeri terutama antar propinsi
Pengiriman misi dagang perlu ditingkatkan melalui KPD Propinsi Jawa Timur yang tersebar di 26 provinsi mitra.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awai RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indicator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.31
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING	
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah	80,5%	6.288.639.952	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah	80,5%	6.288.639.952	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperindag Kab.Lamongan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja yang disusun secara tepat benar dan tepat waktu	17 Dokumen	60.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disperindag Kab.Lamongan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja yang disusun secara tepat benar dan tepat waktu	17 Dokumen	60.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen (Renja Thun N+1 Renja Perubahan, Forum OPD, Dokumen RKA Perubahan, RKA Tahun N+1)	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	5 Dokumen (Renja Thun N+1 Renja Perubahan, Forum OPD, Dokumen RKA Perubahan, RKA Tahun N+1)	15.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen (LKPJ, LKJIP, LPPD, SAKIP, Evaluasi Renja dan SKM	45.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen (LKPJ, LKJIP, LPPD, SAKIP, Evaluasi Renja dan SKM	45.000.000	

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disperindag Kab.Lamongan	26 Dokumen	4.554.231.952	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disperindag Kab.Lamongan	26 Dokumen	4.554.231.952	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji, dan tunjangan ASN	30 erang	4.534.231.952	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	30 orang	4.534.231.952
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	10.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2 Dokumen	10.000.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disperindag Kab.Lamongan		125.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disperindag Kab.Lamongan		125.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	50 Paket	20.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	30 Paket	20.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 orang	100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 orang	100.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2 erang	5.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2 orang	5.000.000

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperindag Kab.Lamongan	12 Laporan	160.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disperindag Kab.Lamongan	12 Laporan	160.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	10.000.000
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	20.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Unit	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Unit	10.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 paket	25.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan pengadaan yang Disediakan	4 paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan pengadaan yang Disediakan	4 paket	20.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 dokumen	35.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 dokumen	35.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	40.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	40.000.000

5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperindag Kab.Lamongan	100%	400.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperindag Kab.Lamongan	100%	400.000.000
	Pengadaan mebel		56 unit	200.000.000	Jumlah paket mebel yang disediakan		56 unit	200.000.000
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		13 unit	200.000.000	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		13 unit	200.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya		1 unit gedung		Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		1 unit gedung	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperindag Kab.Lamongan	100%	674.408.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperindag Kab.Lamongan		674.408.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 laporan	200.000.000	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 laporan	200.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 laporan	35.000.000	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		12 laporan	35.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 laporan	439.408.000	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 laporan	439.408.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperindag Kab.Lamongan	100%	315.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disperindag Kab.Lamongan	100%	315.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan		7 unit roda 4	85.000.000	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		7 unit roda 4	85.000.000

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000	5 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 unit	30.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliharakan/direhabilitasi	1 unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	1 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliharakan/direhabilitasi	1 unit	200.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.270.000.000	100%	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100%	3.270.000.000	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana perdagangan yang dibangun		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah sarana perdagangan yang dibangun			
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	15 unit	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.185.000.000	15 unit	Jumlah sarana distribusi perdagangan	15 unit	3.185.000.000	POKIR 140 JUTA + PRIORITAS LAGI 1.170, 000.000.000
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	1 unit	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10.000.000	1 unit	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	1 unit	10.000.000	
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	%Peningkatan perdagangan yang dibina	35%	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	75.000.000	35%	%Peningkatan perdagangan yang dibina	35%	75.000.000	

	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	1 dokumen	75.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	1 dokumen	75.000.000
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		0,1%		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		0,1%	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	% perubahan harga barang		278.650.620	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	% perubahan harga barang		278.650.620
10	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 laporan	258.650.620	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 laporan	258.650.620
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	37.650.620	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	37.650.620
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk	44,90%	221.000.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk	44,90%	221.000.000
11	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perijinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 dokumen	20.000.000	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perijinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 dokumen	20.000.000
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 laporan	10.000.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 laporan	10.000.000

12	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Net ekspor(rupiah)	2.238.085.000.000	85.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Net ekspor(rupiah)	2.238.085.000.000	85.000.000
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah IKM/UKM yang terfasilitasi Promosi Dagang	30 IKM/UKM	85.000.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Lamongan	Jumlah IKM/UKM yang terfasilitasi Promosi Dagang	30 IKM/UKM	85.000.000
12	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina				Kabupaten Lamongan	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina		
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	50 pelaku usaha		Pameran Dagang Nasional	Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	50 pelaku usaha	5.000.000
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah elaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	30 pelaku usaha	5.000.000	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah elaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	30 pelaku usaha	15.000.000
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	100 Pelaku usaha	65.000.000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kabupaten Lamongan	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	100 Pelaku usaha	65.000.000
13	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kabupaten Lamongan	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina		
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (U TPP) bertanda tera sah yang berlaku	78 %	30.000.000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (U TPP) bertanda tera sah yang berlaku	78 %	30.000.000

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat alat Ukur Takat Timbang dan Pertengkapannya (UTTP) yang ditera / tera ulang dalam tahun berjalan	78%	30.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat alat Ukur Takat Timbang dan Pertengkapannya (UTTP) yang ditera / tera ulang dalam tahun berjalan	78%	30.000.000
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	7995 alat uttp	25.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	7995 alat uttp	25.000.000
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	10 orang	5.000.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	10 orang	5.000.000
PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan emset produk lokal	7%	320.000.000	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan omset produk lokal	7%	320.000.000
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah IKM yang mendapat fasilitas pemasaran	150 UMKM		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah IKM yang mendapat fasilitas pemasaran	150 UMKM	
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100 UMKM	320.000.000	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100 UMKM	320.000.000
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	100 UMKM	100.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	100 UMKM	100.000.000
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		20.000.000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		20.000.000

Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kabupaten Lamongan	Jumlah Orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	100 Orang	200.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kabupaten Lamongan	Jumlah Orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	100 Orang	200.000.000	Ditambah 170 juta pkk
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	2, 12%		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah	2, 12%		
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang dibina	300 IKM	1.455.000.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah IKM yang dibina	300 IKM	1.455.000.000	
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen rencana pembangunan industri	1 Dokumen		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen rencana pembangunan industri	1 Dokumen		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Pervilayahan Industri	Kabupaten Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Pervilayahan Industri	2 Dokumen	10.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Pervilayahan Industri	Kabupaten Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Pervilayahan Industri	2 Dokumen	10.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	10.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3 Dokumen	60.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3 Dokumen	60.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	10.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	10.000.000	DBHCHT 1.000.000.000, DAU 300JT, DID 55JT
				1.355.000.000					1.355.000.000	

	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	10.000.000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	10.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase pertumbuhan IKM formal	78%	27.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase pertumbuhan IKM formal	78%	27.000.000	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah izin yang di terbitkan Usaha Industri (IUI) kecil dan menengah yang di terbitkan	100%	27.000.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah izin yang di terbitkan Usaha Industri (IUI) kecil dan menengah yang di terbitkan	100%	27.000.000	
16	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha industri dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah yang berlokasi di satu kabupaten/kota sepanjang merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	7.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha industri dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah yang berlokasi di satu kabupaten/kota sepanjang merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	7.000.000	

Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem informasi industri nasional (SINAS) yang terintegrasi dengan sistem online single submission risk base approach (OSS RBA)	Kabupaten Lamongan	Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha menengah tinggi dan tinggi, melalui SINAS yang terintegrasi dengan sistem OSS RBA, bagi penanaman modal dalam negeri(PMDN) dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	20.000.000	20.000.000	Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha menengah tinggi dan tinggi, melalui SINAS yang terintegrasi dengan sistem OSS RBA, bagi penanaman modal dalam negeri(PMDN) dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	20.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase data IKM yang masuk dalam SINAS		20.000.000				
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUi, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUi, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia		125.075.600	125.075.600	Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUi, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia		125.075.600
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kabupaten Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen	35.000.000	35.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen	125.075.600
Diseminasi , Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota	Kabupaten Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	25.000.000
				5.000.000	5.000.000			5.000.000

Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten /Kota Dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kabupaten Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	5.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten /Kota Dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kabupaten Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	5.000.000
--	--------------------	--	-----------	-----------	--	--------------------	--	-----------	-----------

2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan dibidang industri dan perdagangan. Melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung, namun usulan yang masuk terlalu banyak dari jumlah usulan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan penelaahan dan prioritas terhadap usulan yang ada.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Revitalisasi/pembangunan pasar rakyat	Ds. Sumberdadaj Kec. Mantup	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	-	-
2	Revitalisasi/pembangunan pasar rakyat	Desa Pucangro Kec. Kalitengah	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	-	-
3	(Dana Dusun)Revitalisasi/pembangunan pasar rakyat	Ds. Sidokumpul Kec. Paciran	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	-	-
4	(Dana Dusun) Revitalisasi/pembangunan pasar rakyat	Dsn. Boworejo Ds. Sidokumpul Kec. Paciran	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	-	-
5	Revitalisasi/pembangunan pasar rakyat	Ds. Sukorejo Kec. Bluluk	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	-	-
6	Revitalisasi/pembangunan pasar rakyat	Ds. Tiwet Kec. Kalitengah	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	-	-
7	Rejitalisasi/pembangunan pasar rakyat	Ds. Tiwet Kec. Kalitengah	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	-	-
8	Revitalisasi/pembangunan pasar rakyat	Ds. Mojorejo Kec. Modo	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	-	-
9	Revitalisasi/pembangunan pasar rakyat	Ds. Karangtinggil Kec. Pucuk	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	-	-

10	Revitalisasi/pembangunan pasar rakyat	Ds. Karangtinggil Kec. Pucuk	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	-	-
11	Revitalisasi/pembangunan pasar rakyat	Ds. Moronyemplung Kec. Kembangbahu	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	-	-
12	Revitalisasi/pembangunan pasar rakyat	Ds. Sukobendu Kec. Mantup	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	-	-
13	Pelatihan pengembangan produk bagi IKM berbasis pangan (olahan ikan, jagung, kedelai, umbi2an (Sumber Daya Alam Lokal))) beserta pemberian alat bantuan produksi dan bahan praktek	Ds. Sendangduwur Kec.Paciran	Jumlah peserta pelatihan	-	-
14	Pelatihan pengembangan produk bagi IKM berbasis pangan (olahan ikan, jagung, kedelai, umbi2an (Sumber Daya Alam Lokal))) beserta pemberian alat bantuan produksi dan bahan praktek	Ds. Windu Kec. Karangbinangun	Jumlah peserta pelatihan	-	-
15	(Dana Dusun) Revitalisasi/pembangunan pasar rakyat	Dsn. wareng, Ds. Songowareng Kec. Bluluk	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	-	-
16	Pelatihan pengembangan produk bagi IKM berbasis pangan (olahan ikan, jagung, kedelai, umbi2an (Sumber Daya Alam Lokal))) beserta pemberian alat bantuan produksi dan bahan praktek	Ds. Sukorejo, Kec. Turi	Jumlah peserta pelatihan	-	-

17	Revitalisasi/pembangunan pasar rakyat	Dsn. Simbatan Kec. Sari Irejo	Jumlah peserta yang direvitalisasi	-	-
18	Revitalisasi/pembangunan pasar rakyat	Dsn. Wareng Kec. Bluluk	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	-	-
19	Revitalisasi/pembangunan pasar rakyat	Ds. Deketwetan Kec. Deket	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	-	-
20	Revitalisasi/pembangunan pasar rakyat	Ds. Deketwetan Kec. Deket	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	-	-
21	Revitalisasi/pembangunan pasar rakyat	Ds. Blawi Kec. Karangbinangun	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	-	-
22	Revitalisasi/pembangunan pasar rakyat	Ds. Keben Kec. Turi	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	-	-

BAB3

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan Tujuan, Sasaran , Program dan Kegiatan selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana yang telah ditetapkan Presiden Republik Indonesia sebagai 5 (lima) arahan utama strategi dalam pelaksanaan Misi Astacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yakni mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi yang selanjutnya diteremakan kedaam 8 agenda pembangunan yang menjadi prioritas

dengan sasaran sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan , maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (satu) dan Tujuan ke 2 (dua) dari RPJMD Kabupaten Lamongan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2025 - 2029 yaitu :

Tujuan

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan

Indikator : Pertumbuhan ekonomi (%)

Sasaran

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Unggulan

Indikator : 1. Persentase Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran

2.Persentase Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

3.3. Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2025 terdiri dari program-program yang menunjang visi dan misi yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.33

Rancangan Akhir Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Lamongan

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
3 30 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah		80,5%	5.646.615.797	Dana Daerah		80,75%	5.646.615.797
3 30 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi kinerja yang disusun secara tepat benar dan tepat waktu	Disperindag Kab. Lamongan	17 dokumen	68.466.400	Dana Daerah		17 dokumen	68.466.400
3 30 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen (Renja Thun N+1 Renja Perubahan, Forum OPD, Dokumen RKA Perubahan, RKA Tahun N+1)	11.408.400	Dana Daerah		5 Dokumen (Renja Thun N+1 Renja Perubahan, Forum OPD, Dokumen RKA Perubahan, RKA Tahun N+1)	11.408.400

3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Dokumen (LKPJ, LKJIP, LPPD, SAKIP, Evaluasi Renja dan SKM	57.058.000	Dana Daerah		6 Dokumen (LKPJ, LKJIP, LPPD, SAKIP, Evaluasi Renja dan SKM	57.058.000
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Disperindag Kab. Lamongan	26 dokumen	4.423.673.200	Dana Daerah		26 dokumen	4.423.673.200
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30 orang	4.404.638.000	Dana Daerah		30 orang	4.404.638.000
3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	9.749.300	Dana Daerah		1 Dokumen	9.749.300
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		2 Dokumen	9.285.900	Dana Daerah		2 Dokumen	9.285.900
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Disperindag Kab. Lamongan	100%	0	Dana Daerah		100%	0
3	30	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		50 paket		Dana Daerah		50 paket	
3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		50 orang		Dana Daerah		50 orang	
3	30	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		2 orang		Dana Daerah		2 orang	

3	30	01	2.06	Administarsi Umum Perangkat Daerah		Disperindag Kab. Lamongan	12 laporan	172.326.400	Dana Daerah	12 laporan	172.326.400
3	30	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 paket	10.000.000	Dana Daerah	12 paket	10.000.000
3	30	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Disperindag Kab. Lamongan	10 paket	20.000.000	Dana Daerah	10 paket	20.000.000
3	30	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5 unit	10.000.000	Dana Daerah	5 unit	10.000.000
3	30	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		35 paket	17.684.900	Dana Daerah	35 paket	17.684.900
3	30	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang Disediakan		4 paket	13.498.500	Dana Daerah	4 paket	13.498.500
3	30	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		10 dokumen	50.000.000	Dana Daerah	10 dokumen	50.000.000
3	30	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	51.143.000	Dana Daerah	12 laporan	51.143.000
3	30	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Disperindag Kab. Lamongan	100%	53.140.600	Dana Daerah	100%	53.140.600
3	30	01	2.07	05 pengadaan mabel	jumlah paket mabel yang disediakan		56 unit		Dana Daerah	56 unit	
3	30	01	2.07	06 pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		13 unit	53.140.600	Dana Daerah	13 unit	53.140.600
3	30	01	2.07	09 Pengadaan Gedung Kantor /Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit Gedung		Dana Daerah	1 Unit Gedung	

3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Disperindag Kab. Lamongan	100%	655.144.115	Dana Daerah		100%	655.144.115
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	239.269.115	Dana Daerah		12 laporan	239.269.115
3	30	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan	20.000.000	Dana Daerah		12 laporan	20.000.000
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	395.875.000	Dana Daerah		12 laporan	395.875.000
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Disperindag Kab. Lamongan	100%	273.865.082	Dana Daerah		100%	273.865.082
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		7 Unit Roda 4	65.000.000	Dana Daerah		7 Unit Roda 4	65.000.000
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 Unit	65.000.000	Dana Daerah		5 Unit	65.000.000
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	143.865.082	Dana Daerah		1 unit	143.865.082
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		100%	525.787.500	Dana Daerah		100%	525.787.500
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Perdagangan yang dibangun	Kabupaten Lamongan	15 unit	446.477.500	Dana Daerah, DID		15 unit	446.477.500

3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		15 unit	439.216.200	DID	POKIR 332500000, KEG PASAR 100 JT	15 unit	439.216.200
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		1 unit	7.261.300	DID		1 unit	7.261.300
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	% Peningkatan pedagang yang dibina	Kabupaten Lamongan	35%	79.310.000	DID		35%	79.310.000
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		1 dokumen	79.310.000	DID		1 dokumen	79.310.000
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu		0,1%	273.396.000	Dana Daerah, DID		0,1%	273.396.000
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	% perubahan harga barang	Kabupaten Lamongan		255.602.800	DID			255.602.800
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kabupaten Lamongan	12 laporan	46.948.400	Dana Daerah, DID		12 laporan	46.948.400
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Lamongan	1 laporan	208.654.400	DID		1 laporan	208.654.400
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk		44,90%	17.793.200	DID		44,90%	17.793.200

3	30	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kabupaten Lamongan	1 dokumen	10.586.500	DID		1 dokumen	10.586.500
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kabupaten Lamongan	1 laporan	7.206.700	DID		1 laporan	7.206.700
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Net Ekspor (rupiah)		Rp. 2.238.085.000.000	402.780.500	DID		Rp. 2.238.085.000.000	402.780.500
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah IKM/UKM yang terfasilitasi Promosi Dagang		30 IKM/UKM	402.780.500	DID		30 IKM/UKM	402.780.500
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina							
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	Nasional	50 pelaku usaha	235.354.000	DID		50 pelaku usaha	235.354.000
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		30 pelaku usaha	17.426.500	DID		30 pelaku usaha	17.426.500
3	30	05	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Kabupaten Lamongan	100 pelaku usaha	150.000.000	DID		100 pelaku usaha	150.000.000
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Kabupaten Lamongan						
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UJTP) bertanda tera sah yang berlaku		78%	24.316.500	DID		78%	24.316.500

3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat alat Ukur Takat Timbang dan Pertengkapannya (UTTP) yang ditera / tera ulang dalam tahun berjalan		78%	24.316.500	DID		78%	24.316.500
3	30	06	2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Pertengkapan Ditera Ulang	Kabupaten Lamongan	7995 unit	21.731.100	DID		7995 alat UTTP	21.731.100
3	30	06	2.01	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kabupaten Lamongan	10 orang	2.585.400	DID		10 orang	2.585.400
3	30	07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan omset produk lokal		7%	458.382.800	Dana Daerah		7%	458.382.800
3	30	07	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah IKM yang mendapat fasilitas pemasaran		150 UMKM	458.382.800	Dana Daerah , DID		150 UMKM	458.382.800
3	30	07	2.01	pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri	jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri	Kabupaten Lamongan	100 orang	205.000.000	DID		100 orang	205.000.000
3	30	07	2.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		100 UMKM	232.352.200	DID		100 UMKM	232.352.200
3	30	07	2.01	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi		100 UMKM	21.030.600	DID		100 UMKM	21.030.600
3	30	07	2.01	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan							

3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah		2,12%	2.281.250.000	Dana Daerah, DID		2,12%	2.281.250.000				
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang dibina		300 IKM	2.281.250.000	Dana Daerah, DID		300 IKM	2.281.250.000				2.281.250.000
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana pembangunan industri		1 dokumen		DID		1 Dokumen					
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Pervilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Pervilayahan Industri	Kabupaten Lamongan	2 dokumen		DID		2 dokumen					
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Lamongan	1 dokumen	100.000.000	DID	PKK	1 dokumen	100.000.000				
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Lamongan	1 dokumen	50.000.000	DID	DBHCHT 50 JT	1 dokumen	50.000.000				
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten Lamongan	3 dokumen	2.131.250.000	DBHCHT, DID	DBHCHT 1.950.000.000, pemberdayaan industri 181250000 juta	3 dokumen	2.131.250.000				
3	31	02	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		1 Dokumen		DID		1 Dokumen					

3	31	03	2.01	04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem informasi industri nasional (SINAS) yang terintegrasi dengan sistem online single submission risk base approach (OSS RBA)	jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha menengah tinggi dan tinggi, melalui Sinas yang terintegrasi dengan sistem OSS RBA, bagi penanaman modal dalam negeri(PMDN) dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kabupaten Lamongan	1 dokumen	13.750.000	DID	1 dokumen	13.750.000
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data IKM yang masuk dalam SINAS			34.000.000	DID		34.000.000
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia			34.000.000	DID		34.000.000
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINas)	Kabupaten Lamongan	2 dokumen	34.000.000	DID	2 dokumen	34.000.000
3	31	04	2.01	02	Diseminasi , Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SINas	Kabupaten Lamongan	1 Dokumen		DID	1 Dokumen	

3	31	04	2.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten /Kota Dalam Penyampaian Data ke SINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SINas	Kabupaten Lamongan	1 Dokumen		DID		1 Dokumen		9.666.279.097	9.666.279.097
---	----	----	------	----	---	---	--------------------	-----------	--	-----	--	-----------	--	---------------	---------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Renja dan pendanaan tahun 2025 berisi capaian kinerja yang bertujuan mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan Ranwal RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah ,dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2025-2029, yaitu "TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKELANJUTAN", ditempuh melalui lima misi. Oleh karena itu, untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada Ranwal RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (satu) yaitu "Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan" dan Tujuan dari Ranwal RPJMD Kabupaten Lamongan yaitu "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan".

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Industri dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang, yaitu melaksanakan tugas dalam pembinaan dan pembangunan urusan industri dan perdagangan di Kabupaten Lamongan yang efektif, efisiensi dan terintegrasi melalui proses perencanaan .

BABV

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi, sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Sebagai sebuah rencana , dokumen ini memuat rencana program kegiatan yang masih bersifat indikatif, oleh karena itu dimungkinkan untuk dilakukan berbagai perubahan dan perbaikan terhadap rencana tersebut.

Dalam penyusunan Renja ini , Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis terkait bidang Industri dan perdagangan nasional maupun Propinsi Jawa Timur. Selain itu Renja ini sedapat mungkin mengupayakan sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan nasional yang diambil oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan , Propinsi , Kabupaten dan masukan hasil musrenbang yang difasilitasi Bappeda juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja ini.

5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh jajaran dan staf dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:
 - Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - Menjaga Konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala (tribulanan) terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025;

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025 ini, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Platfond Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Lamongan ,4 Juni 2025



Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lamongan

ANANG TAUFIK, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750404 199602 1 003